

2021

Tahun 2021

Laporan Kinerja (Lkj)

BAPPEDA KOTA BINJAI

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
PENDAHULUAN.....	9
1.1. LATAR BELAKANG.....	9
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ).....	10
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	14
2.2. KONDISI KEPEGAWAIAN.....	16
2.3. VISI DAN MISI.....	18
2.4. TUJUAN DAN SASARAN.....	20
2.5. STRATEGI.....	23
2.6. KEBIJAKAN.....	25
2.7. PROGRAM.....	25
2.8. PENETAPAN KINERJA.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. CAPAIAN KINERJA UTAMA.....	30
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN.....	34
3.3. TUJUAN PENYUSUNAN LKj.....	39
3.4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
a. Pengukuran Capaian Kinerja.....	40
4.1. KESIMPULAN.....	44
4.2. REKOMENDASI DAN SOLUSI.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	16
Tabel 2 :	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	17
Tabel 3 :	MISI – TUJUAN	21
Tabel 4 :	TUJUAN - SASARAN	1
Tabel 5 :	TUJUAN – STRATEGI	23
Tabel 6 :	Penetapan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021	26
Tabel 7 :	Capaian Kinerja Utama	31
Tabel 8 :	Indikator Kinerja Sasaran 1	39
Tabel 9 :	Indikator Kinerja Sasaran 2	35
Tabel 10 :	Indikator Kinerja Sasaran 3	36
Tabel 11 :	Indikator Kinerja Sasaran 4	37
Tabel 12 :	Indikator Kinerja Sasaran 5	38
Tabel 13 :	Pengukuran Capaian Kinerja	40



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Bappeda Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda Kota Binjai Tahun 2021, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja (LKJ), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan laporan kinerja .

Secara substantif, Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda Kota Binjai merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui Laporan Kinerja (LKJ), Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda.

Tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Laporan kinerja (LKJ) Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Renstra Bappeda 2016-2021 serta Renja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 sebagai wujud dari keinginan Bappeda Kota Binjai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun ini dan akan datang.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappeda Kota Binjai

Binjai, Februari 2022

KEPALA BAPPEDA KOTA BINJAI

MAJID GINTING, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650630 198703 1 005

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Salah satu wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan kebijaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik adalah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai menggunakan 5 Sasaran Strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai	1. Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	1 Kegiatan	100.751.158.	77.98
	2. Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Musrenbang RKPD/Forum RKPD)	1 Kegiatan	231.537.463.	85.69
2. Terwujudnya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	3. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	184.607.861.	64.61
	4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	180.205.228.	68.84
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,	1 Kegiatan	121.546.288.	64.65



	RPJMD, RKPD)			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perentase Capaian
	6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Kegiatan	38.557.662.	27.69
	7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 Kegiatan	96.830.906	88.23
	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Kegiatan	58.675.629.	98.60
3. Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Penelitian dan Pengembangan semakin meningkat	9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	177.620.100.	70.48
	10. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan	307.601.581.	82.38
	11. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Kegiatan	865.685.424.	80.64



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4. Tersedianya data Infrastruktur Perkotaan dan Kewilayahan	12. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kota Binjai (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 kegiatan	77.028.376.	77.03
	13. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 kegiatan	66.178.595.	63.78
	14. Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	1 Kegiatan	79.991.800.	94.52
	15. Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	297.970.490.	78.14
	16. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Kegiatan	30.090.224	93.93



5. Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, administrasi perkantoran, dan sarana dan prasarana kerja	17. Penyediaan jasa surat menyurat	1 Kegiatan	3.450.000.	100.00
	18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Kegiatan	77.754.461.	56.29
	19. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	173.332.900	85.03
	20. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Kegiatan	2.143.600.	57.88
	21. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	132.042.300	99.92
	22. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Kegiatan	94.645.399.	99,85
	23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	12.995.000.	79.92
	24. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	3.514.556.72 1	94.87
	25. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan	120.879.034.	87.94
	26. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kegiatan	162.440.000.	99.90



27.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	2.559.600..	100.00
28.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	12.340.500.	95.53
29.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	1 Kegiatan	10.820.000.	99.09
30.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Kegiatan	78.564.700.	100.00
31.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	133.049.595.	99.78
32.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	40.849.500	100.00
33.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	96.940.000	98.77
34.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	15.070.000.	85.82

Dari 34 Indikator yang ditetapkan ada 5 indikator yang telah mencapai target 100%, 22 indikator yang mencapai target antara 80 – 99%, 9 Indikator yang mencapai target hampir mendekati 60-80%, hanya 3 indikator yang mencapai target dibawah 60%, semua kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai sudah dilaksanakan mendekati target, secara umum kinerja Badan Perencanaan Daerah Kota Binjai mengalami peningkatan.

Indikator yang diukur adalah penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan, pencapaian keluaran dan efisiensi. Sedangkan aspek implementasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan yang terjadi., Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai pada tahun 2021 adalah 86,00%.

**1****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan *good governance*, mutlak dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, penerapan *good governance* harus di dukung seluruh unit kerja / instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Sebagai pertanggungjawabannya dibuat berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja, Bappeda Kota Binjai menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk



Lakip (Laporan Kinerja) Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Binjai.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Binjai 2016 – 2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Tahun 2021 Bappeda Kota Binjai, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2021, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PBD) Kota Binjai Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Binjai.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Daerah Kota Binjai Nomor 9);
18. Peraturan Daerah kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);



19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj (Laporan Kinerja) Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 adalah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKj Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Binjai kepada Walikota Binjai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Bappeda.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj Laporan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif	Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2021.
BAB I Pendahuluan	Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKj.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menguraikan tentang Gambaran Umum Bappeda Kota Binjai, Visi dan Misi Bappeda Kota Binjai, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang menjadi acuan



pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Utama, Analisis Capaian Kinerja Tiap Sasaran, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan pengukuran pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Bappeda Kota Binjai, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Binjai diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan peraturan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan prasarana, pengendalian dan pemantauan pembangunan, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial budaya, penelitian dan pengembangan serta penanaman modal;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. pelaksanaan yang tugas lain diterbitkan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 1 : Bagan Struktural Organisasi Bappeda Kota Binjai****2.2. KONDISI KEPEGAWAIAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2016. Badan Perencanaan Pembangun Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Bappeda Kota Binjai didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Kota Binjai sampai dengan tahun 2021 sebanyak 40 (Empat puluh) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1				1
2	Sekretariat			1	2	7	10
4	Bidang Perekonomian Sosial dan Budaya			1	3	4	8
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan			1	2	6	9
8	Bidang Sarana dan Prasarana			1	3	8	12
10.	Pejabat Fungsional						
	JUMLAH		1	4	10	26	40

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda



Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda, 2 (dua) bidang perencana yaitu Bidang Perekonomian, dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sementara 1 (satu) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting* terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian dan Pengembangan memberikan dukungan berupa penyediaan data dan informasi serta hasil kajian dan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Memberikan kajian ilmiah dan analisis terhadap perencanaan pembangunan sedangkan penyediaan data informasi menjalankan peran untuk dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV yang lebih sedikit dari pada bidang yang lain, dan mempunyai banyak staf, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1						1
2	Sekretariat		2	5	0	3	0	0	10
3	Bidang Perekonomian dan sosbud			8	0	0	0	0	8
4	Bidang Litbang		1	6	1	1	0	0	9
5	Bidang Sarana dan Prasarana		5	6	0	1	0	0	12
6	Pejabat Fungsional /Staf		0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		9	25	1	5	0	0	40
									100%

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Binjai

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah yang menamatkan



pendidikan S-1 sebanyak 25 (dua puluh enam) orang. Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup tersedia, tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang, secara persentase jumlah tersebut cukup ideal, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya *Think Tank* Pemerintah Kota Binjai, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana.

2.3. VISI DAN MISI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Binjai, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat erat keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota yaitu, "Terwujudnya Kota Binjai Sebagai Kota Idaman Yang Dinamis, Berdaya Saing dan Nyaman Dalam Kebersamaan"

Untuk itu rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah "**Terwujudnya Perencanaan yang Handal, Partisipatif dan Akuntabel**".

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada kebersamaan dan peningkatan daya saing. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal adalah proses perencanaan pembangunan dapat dipercaya.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif adalah SDM perencanaan yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan pembangunan masyarakat baik secara pemerintahan, ekonomi dan sosial budayanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi Bappeda Kota Binjai Tahun 2016-2021, maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Kota Binjai, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang



(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Kota Binjai. Untuk itu, Bappeda Kota Binjai menetapkan misi 2016-2021 sebagai berikut :

1. mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas;
2. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu terarah dan sistematis ;
3. mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan
6. mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.
7. mengembangkan infrastruktur perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas yang berbasis teknologi.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub System dari System perencanaan pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang kebijakan teknis diambil adalah perencanaan tata ruang wilayah yang dapat meningkatkan infrastruktur perkotaan.

3. Misi Ketiga

Perencanaan pembangunan daerah perlu pengembangan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

4. Misi Keempat

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian.

5. Misi Kelima



Perencanaan pembangunan agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan diperlukan suatu sistem evaluasi, monitoring, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi sesuai dengan yang diharapkan

6. Misi Keenam

Perencanaan pembangunan daerah harus diperhatikan kualitas sumber daya manusianya dan melengkapi sarana dan prasarana kerja hal ini menjadi sangat penting dan menjadi keberhasilan proses perencanaan.

7. Misi ketujuh

Perencanaan pembangunan daerah tentu mempunyai peranan penting adanya peningkatan infrastruktur perkotaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan.

2.4. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Bappeda Kota Binjai dirumuskan sebagai berikut :

1. Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Binjai;
2. Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas Perangkat Daerah guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Binjai;
4. Memberdayakan stakeholders pembangunan Kota Binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistim informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Binjai;
7. Mengembangkan Infrastruktur Perkotaan.

Sasaran :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Binjai;
2. Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan;
3. Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku;



4. Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Binjai;
5. Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Binjai
6. Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;
7. Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang yang semakin meningkat;
8. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
9. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;
10. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;
11. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional;
12. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda.
13. Tersedianya data infrastruktur perkotaan.

Tabel 3 : MISI – TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1.	mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Binjai
2.	mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas Perangkat Daerah guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Binjai
3.	mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Memberdayakan stakeholders pembangunan Kota Binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas



NO	MISI	TUJUAN
4.	mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan pembangunan;
5.	mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Binjai.
6.	merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu terarah dan sistematis serta Mengembangkan infrastruktur perkotaan	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah serta Meningkatkan infrastruktur daerah
7.	Mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah serta melengkapi data-data pembangunan daerah	Meningkatkan SDM dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4 :TUJUAN - SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Binjai	a) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai acuan bagi stakeholder pembangunan pemerintah Kota Binjai; b) Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan;
2.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah	a) Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku, Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan; b) Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota



NO	TUJUAN	SASARAN
		Binjai;
3.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Binjai	a) Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Binjai
4.	Memberdayakan stakeholders pembangunan kota binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas	b) Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang; c) Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang yang semakin meningkat;
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistim informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan pembangunan;	a) Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; b) Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik; c) Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja
6.	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Binjai.	a) Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional; b) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda

2.5. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 5 : TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1.	Menghasilkan dokumen jangka panjang, jangka	a) Membangun sistem perencanaan yang berbasis teknologi b) Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk



	menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Binjai	menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat c) Menyediakan sarana sosialisasi perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat partisipatif masyarakat
2.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah	a) Menyediakan aturan dan acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang wilayah infrastruktur b) Melakukan kajian-kajian yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Binjai sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara c) Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistematis
3.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Binjai	a) Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan b) dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya
4.	Memberdayakan stakeholders pembangunan Kota Binjai guna meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas	a) Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM b) serta Lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan c) teknologi
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, an monitoring pelaksanaan pembangunan;	a) Mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan; b) Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu dan tepat sasaran
6.	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Binjai.	a) Memanfaatkan sarana administrasi dan sarana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur b) Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal
7.	Meningkatkan investasi daerah	a) Memanfaatkan investor dari luar daerah untuk pembangunan Kota Binjai b) Mengikutsertakan lembaga keuangan atau masyarakat untuk ikut menanamkan modalnya dalam



2.6. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Arah Kebijakan Bappeda Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis;
2. Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisasi Pencapaian Kinerja;
3. Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
4. Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
5. Menyelenggarakan Forum Musrenbang dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.
8. Mengikutsertakan pihak ke tiga untuk pembangunan daerah.

2.7. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan Bappeda Kota Binjai pada tahun 2021 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran
2. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Program Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
7. Program Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Bidang SDA
10. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
11. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

**2.8. PENETAPAN KINERJA**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kota Binjai tahun 2021. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2021 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2021, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 6 :Penetapan Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2021	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)
Misi-1 :				
Mewujudkan pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkualitas				
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai	Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	1 Kegiatan	Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	129.200.600.-
	Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Musrembang RKPD/ Forum RKPD)	1 Kegiatan		270.197.400.-
	Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD	1 Kegiatan		84.633.300.-
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan		1.073.529.200,-
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2021	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)
MISI-2:				
Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, tata ruang secara kontinyu, terarah dan sistematis				
Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan dan aturan yang berlaku	Terlaksananya Koordinasi SInergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Kegiatan	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	103.768.800,-
	Koordinasi Penyusunan DOKumen	1 Kegiatan		99.999.100,-



	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Kegiatan		32.034.900,-
MISI - 3:				
mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial				
Terwujudnya sedianya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Kegiatan	Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)	109.751.800,-
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2021	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)
	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Kegiatan		139.262.700,-
	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	1 Kegiatan		59.509.100,-



	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
MISI-4:				
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang semakin meningkat	Terlaksananya Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.917.400,-
Misi 5:				
Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan				
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	Program Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	381.312.900.-
Misi 6:				
mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja				
Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, administrasi perkantoran, dan sarana dan prasarana kerja	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Kegiatan	Program Pelayanan	3.450.000,-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Kegiatan	Administrasi Perkantoran	138.143.700,-
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET THN 2021	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Kegiatan		94.786.600,-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Kegiatan		3.703.600,-
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan		3.704.713.144,-
	Penyedia Bahan Logistik Kantor			132.042.300,-



	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Kegiatan		16.260.000,-
Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional, administrasi perkantoran, dan sarana dan prasarana kerja	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.600.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan		2.559.600,-
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik	1 Kegiatan		133.049.595,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1Kegiatan		78.567.600,-
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan		10.820.000,-
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan		98.152.000,-
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan		17.560.000,-
	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	1 Kegiatan		40.850.000,-
Misi-7				
Mengembangkan infrastruktur perkotaan				
Tersedianya data Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 kegiatan	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	285.711.100,-
	Monitoring, Evaluasi dan	1 kegiatan		261.760.100,-



	Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
--	---	--	--	--

3**AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja adalah kondisi (state of condition) dari suatu pelaksanaan kinerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan).

3.1. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Capaian kinerja utama dibuat sasaran yaitu meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia/aparatur dan

LKj (Laporan Kinerja) BAPPEDA Kota Binjai Tahun 2021



meningkatnya pengembangan sistem pelaporan keuangan dengan indikator semakin meningkatnya kinerja melalui keikutsertaan dalam bimtek, seminar, kursus tugas belajar dan lain-lain.

Tabel 7 : Capaian Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Percentase Capaian
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai	1. Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	1 Kegiatan	100.751.158.	77.98
	2. Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Musrenbang RKPD/Forum RKPD)	1 Kegiatan	231.537.463.	85.69
2. Terwujudnya kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan, kebijakan perencanaan pembangunan diberbagai bidang	3. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	184.607.861.	64.61
	4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	180.205.228.	68.84
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 Kegiatan	121.546.288.	64.65
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Percentase Capaian
	6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Kegiatan	38.557.662.	27.69



	7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 Kegiatan	96.830.906	88.23
	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Kegiatan	58.675.629.	98.60
3. Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Penelitian dan Pengembangan semakin meningkat	9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	177.620.100.	70.48
	10. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DOKumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan	307.601.581.	82.38
	11. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	865.685.424.	80.64
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Percentase Capaian
4. Tersedianya data Infrastruktur Perkotaan dan Kewilayahan	12. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 kegiatan	77.028.376.	77.03



	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kota Binjai (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	13. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 kegiatan	66.178.595.	63.78
	14. Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	1 Kegiatan	79.991.800.	94.52
	15. Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	297.970.490.	78.14
	16. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Kegiatan	30.090.224	93.93
6. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional,	17. Penyediaan jasa surat menyurat	1 Kegiatan	3.450.000.	100.00



administrasi perkantoran, dan sarana dan prasarana kerja				
	18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Kegiatan	77.754.461.	56.29
	19. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	173.332.900	85.03
	20. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Kegiatan	2.143.600.	57.88
	21. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	132.042.300	99.92
	22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Kegiatan	94.645.399.	99,85
	23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	12.995.000.	79.92
	24. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	3.514.556.72 1	94.87
	25. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan	120.879.034.	87.94
	26. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kegiatan	162.440.000.	99.90
	27. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	2.559.600..	100.00
	28. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	12.340.500.	95.53
	29. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	1 Kegiatan	10.820.000.	99.09
	30. Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Kegiatan	78.564.700.	100.00
31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Kegiatan	133.049.595.	99.78	



	dan Konsultasi SKPD			
32.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	40.849.500	100.00
33.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	96.940.000	98.77
34.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	15.070.000.	85.82

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

Tabel 8 :Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	1 Kegiatan	100.751.158,-	77.98
2.	Terencananya Pembangunan di Kota Binjai (Musrembang RKPD/ Forum RKPD)	1 Kegiatan	231.537.463,-	85.69

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

Tabel 9 : Indikator Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	184.607.861.	64.61
2.	Monitooring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	180.205.228,-	68.84
3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Kegiatan	121.546.288,-	64.65



4.	Perencanaan Pembanguna Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Kegiatan	38.557.662.	27.69
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Kegiatan	96.830.906	88.23
		1 Kegiatan	58.675.629.	98.60

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

Tabel 10 : Indikator Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	177.620.100.	70.48
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan	307.601.581.	82.38
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	1 Kegiatan	865.685.424.	80.64



NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat

Tabel 11 : Indikator Kinerja Sasaran 4

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kota Binjai (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 kegiatan	77.028.376.	77.03
2.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 kegiatan	66.178.595.	63.78
3.	Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	1 Kegiatan	79.991.800.	94.52
4.	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	297.970.490.	78.14
5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Kegiatan	30.090.224	93.93



NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kelima

Tabel 12 : Indikator Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Kegiatan	3.450.000.	100.00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Kegiatan	77.754.461.	56.29
3.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	173.332.900	85.03
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Kegiatan	2.143.600.	57.88
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	132.042.300	99.92
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Kegiatan	94.645.399.	99,85
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	12.995.000.	79.92
8.	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	3.514.556.721	94.87
9.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan	120.879.034.	87.94
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kegiatan	162.440.000.	99.90
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Kegiatan	2.559.600..	100.00
12.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	12.340.500.	95.53



NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
13.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	1 Kegiatan	10.820.000.	99.09
14.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Kegiatan	78.564.700.	100.00
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	133.049.595.	99.78
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	40.849.500	100.00
17.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	96.940.000	98.77
18.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	15.070.000.	85.82

3.3. TUJUAN PENYUSUNAN LKj

Mewujudkan akuntabilitas lembaga/instansi kepada pihak yang memberi mandat mengenai kinerja lembaga/instansi yang bersangkutan

1. Manfaat LKj

- Peningkatan Akuntabilitas Instansi
- Umpan balik peningkatan kinerja instansi
- Peningkatan perencanaan di segala bidang
- Peningkatan kredibilitas Instansi
- Evaluasi keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
- Mendorong penyelenggaraan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
- Perbaiki Tata Kelola dan Manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran, yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian kinerja dalam bentuk prosentase.

3. Evaluasi Kinerja

Metode yang digunakan oleh Bappeda Kota Binjai sesuai dengan variabel yang telah ada dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan adalah melakukan



perbandingan antara realisasi dengan targetnya sehingga diketahui berapa persen capaian kerjanya.

Metode Evaluasi kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

3.4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan serapan anggaran yaitu : merealisasi anggaran dikaitkan dengan rata-rata capaian kinerja.

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Tabel 14 : Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	%
MENINGKATNYA DAYA DUKUNG SARANA DAN PRASARANA KERJA				
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	3.450.000.	100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	77.754.461.	56.29
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	173.332.900.	85.03
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100%	94.645.399.	99,85
Penyediaan Bahan	Tersediaanya Bahan	100%	12.995.000.	79.92



SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	%
Logistik Kantor	Logistik Kantor			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	3.514.556.721	94.87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	120.879.034.	87.94
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	94.645.399.	99,85
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12.995.000.	79.92
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	40.849.500	100.00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediaanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	96.940.000	98.77
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediaanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	15.070.000.	85.82
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
Fasilitasi,	Fasilitasi, Pelaksanaan	100%	177.620.100.	70.48



SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	%
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100%	307.601.581.	82.38
5.PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	297.970.490.	78.14
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	12.340.500.	95.53
MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF DAN DINAMIS				
6.PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				
Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Forum SKPD/ Lintas SKPD	1 Kegiatan	79.991.800.	94.52
7.PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Terencanakan Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	Terencanakan Pembangunan di Kota Binjai (Konsultasi Publik)	1 Kegiatan	100.751.158.	77.98
Terencanakan Pembangunan di Kota Binjai (Musrembang RKPD/ Forum RKPD)	Terencanakan Pembangunan di Kota Binjai (Musrembang RKPD/ Forum RKPD)	1 Kegiatan	231.537.463.	85.69
8.PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI				
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Terkoordinasi Pengendalian Perencanaan dan	1 Kegiatan	184.607.861.	64.61



SASARAN / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	%
Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Termonitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	180.205.228.	68.84
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Terkoordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 Kegiatan	121.546.288.	64.65
9.PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA				
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	177.620.100.	70.48
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Teroordinasinya Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan	307.601.581.	82.38

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja Bappeda Kota Binjai dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) Indikator yang ditetapkan yaitu :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan out put, misalnya sumber daya manusia, dana , material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan dari masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatana jangka menengah Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses publik.



- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya, yang dimulai oleh capaian kinerja indikator dalam suatu kegiatan.

Bappeda Kota Binjai pada tahun 2021 telah melaksanakan 8 (delapan) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Program Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
7. Program Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
10. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Bidang SDA
11. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
12. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja (LKJ) sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 6239/IX/6/Y/2004, tanggal 25 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA Kota Binjai telah menerapkan LKj sebagai media pertanggung Jawaban kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan Laporan Kinerja Instansi (LKJ)

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi;



2. Sebagai umpan balik untuk Peningkatan Kinerja;
3. Peningkatan Perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas Instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
8. Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu setiap Instansi Pemerintah diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada Publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

4.2. REKOMENDASI DAN SOLUSI

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja instansi pada Bappeda Kota Binjai dapat direkomendasikan bahwa :

- Kurangnya Perencanaan Program Prioritas atau Isu Strategis yang dituangkan dalam Renstra SKPD dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD
- Perlunya didukung ketersediaan dan validasi data perencanaan pembangunan, karena data yang ada belum terintegrasi mengingat banyaknya sumber.
- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dikarenakan masih rendahnya mutu SDM aparatur/peneliti.
- Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan dan dokumen kajian yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Binjai terutama untuk perencanaan maupun kajian sektoral.
- Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir triwulan ke – IV setiap tahunnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut , bebe rapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

- Melakukan kegiatan verifikasi dan pendampingan penyusunan RENSTRA SKPD
- Melakukan revisi rencana strategis Bappeda Kota Binjai dalam rangka menyelaraskan sasaran dengan indicator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan menetapkan target-target Renstra untuk memberikan kejelasan arah, tujuan/sasaran sehingga sumber daya yang ada (keuangan,sarana dan personil), lebih terarah untuk mencapai sasaran tersebut.
- Perlu dianggarkan penyusunan data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun Anggaran 2021.



- Pembuatan aplikasi e-planning
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan.